

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SATU JUTA
SATU PEKARANGAN DI KECAMATAN LUWUK SELATAN
KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Fauzi Mutashawwir Maita

NPP. 32.0852

Asdaf Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: 32.0852@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Jojo Juhaeni, MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research was motivated by a gap in implementation in Kecamatan Luwuk Selatan, which shows that group income receipts are still relatively low compared to other kecamatan, despite its strategic geographical location and large area. This indicates that the utilization and management of the SJSP program assistance in the area is not optimal. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of community empowerment, through the One Million One Yard Program (SJSP) in South Luwuk District, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. **Methods:** The study used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques included in-depth interviews with key informants consisting of TPHP Office officials, sub-district heads, Head of BPP, and heads of beneficiary groups, non-participant observation, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The results show that the principle of equality is realized through the fulfillment of rights and obligations and the fair distribution of assistance; the principle of participation is implemented in program planning, implementation, supervision, and evaluation; the principle of self-reliance is realized through increasing decision-making ability and community productivity; and the principle of sustainability is maintained through program continuity and effective resource management. Obstacles encountered include weather factors and delays in aid distribution. **Conclusion:** The SJSP program in Luwuk Selatan Sub-district has been running according to the principles of community empowerment and has had a positive impact on improving the welfare and food security of the community, although it still requires improvements in the technical aspects of implementation to optimize program results.

Keywords: community empowerment, yard program, food security, community participation, program sustainability

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya di Kecamatan Luwuk Selatan yang menunjukkan penerimaan pendapatan kelompok masih tergolong rendah dibandingkan kecamatan lain, meskipun memiliki letak geografis strategis dan luas wilayah yang cukup besar. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan bantuan program SJSP di wilayah tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, melalui program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. **Metode:**

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat Dinas TPHP, Camat, Kepala BPP, dan ketua kelompok penerima manfaat, observasi non-partisipan, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan terwujud melalui pemenuhan hak dan kewajiban serta distribusi bantuan yang adil; prinsip partisipasi terimplementasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program; prinsip keswadayaan terealisasi melalui peningkatan kemampuan pengambilan keputusan dan produktivitas masyarakat; serta prinsip keberlanjutan terjaga melalui keberlangsungan program dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Kendala yang dihadapi meliputi faktor cuaca dan keterlambatan penyaluran bantuan. **Kesimpulan:** Program SJSP di Kecamatan Luwuk Selatan telah berjalan sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan serta ketahanan pangan masyarakat, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam aspek teknis pelaksanaan untuk mengoptimalkan hasil program.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, program pekarangan, ketahanan pangan, partisipasi masyarakat, keberlanjutan program

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan selain pelayanan dan pembangunan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan, menurut Djohani dalam Anwas (2019), adalah proses untuk menyeimbangkan kekuasaan antara pihak yang berkuasa dan yang lemah, serta meningkatkan kapasitas individu atau kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, fisik, emosional, maupun sosial. Hamid (2018) memperkuat konsep ini dengan menjelaskan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Antara (2015) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, memperoleh barang dan jasa, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok miskin, melalui akses terhadap sumber daya produktif.

Salah satu potensi lokal yang strategis namun sering belum dimanfaatkan secara optimal adalah lahan pekarangan. Pekarangan, menurut Kementerian Pertanian, merupakan lahan di sekitar tempat tinggal yang memiliki batas kepemilikan jelas dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menanam sayuran, buah-buahan, atau memelihara ternak. Saroinsong (2021) menegaskan bahwa pekarangan rumah sebagai lanskap yang dapat dimakan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat digunakan sebagai strategi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh, memberikan manfaat sebagai sumber berbagai makanan dan obat tradisional, mendukung konservasi, memperbaiki iklim mikro, meningkatkan kesehatan, fungsi pendidikan, rekreasi dan estetika, memperkuat status sosial, serta meningkatkan pendapatan. Pemanfaatan pekarangan memberikan manfaat konservasi lingkungan, peningkatan ekonomi keluarga melalui produksi tanaman produktif, serta memperkuat ketahanan pangan rumah tangga.

Surya (2020) dalam penelitiannya di Makassar menunjukkan bahwa urban farming berbasis pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan komunitas sebesar 27,66%, memperkuat kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sebesar 55,95%, dan memberikan dukungan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 36,72%. Beragam metode penanaman dapat diterapkan sesuai kondisi lahan, mulai dari penanaman langsung di tanah, penggunaan pot atau polybag, hingga sistem vertikultur untuk lahan sempit.

Sugiyanto (2023) dalam studinya tentang urban farming di Malang menekankan bahwa pertanian perkotaan dapat berkontribusi pada ketahanan masyarakat untuk potensi pangan dan kecukupan nutrisi, terutama untuk populasi yang berisiko tinggi selama keadaan darurat seperti kasus COVID-19. Di berbagai daerah di Indonesia, pemanfaatan pekarangan telah menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif. Wijaya (2021) membuktikan bahwa program cadangan pangan berkelanjutan di Jawa Timur berhasil dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap malnutrisi dan memberdayakan mereka untuk meningkatkan mata pencaharian, serta memperbaiki pola konsumsi masyarakat dengan cara yang menjamin konsumsi pangan seimbang dan meningkatkan lima modal penghidupan. Eprilianto (2023) juga menunjukkan bahwa keberhasilan program pangan berkelanjutan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap kesadaran, tahap kapasitas dan akhirnya tahap pemberdayaan, dimana masyarakat dapat mengelola program secara mandiri melalui kelembagaan yang terbentuk.

Prastyanti (2024) melalui penelitiannya di Yogyakarta mengidentifikasi bahwa strategi komunikasi pembangunan partisipatif dalam program urban farming yang berakar pada pendekatan komunikasi pembangunan partisipatif dari bawah ke atas mulai dari perencanaan hingga evaluasi dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat, menjadikan keberhasilan dan keberlanjutan program sebagai tanggung jawab bersama. Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap program.

Di berbagai daerah di Indonesia, pemanfaatan pekarangan telah menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat, termasuk di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai, yang terdiri dari 23 kecamatan, telah menunjukkan penurunan signifikan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BPS dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai, persentase penduduk miskin menurun dari 7,83% pada tahun 2021 menjadi 6,94% pada tahun 2023, dan angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga nol persen pada tahun 2023. Dulkadir (2024) dalam penelitiannya tentang ketahanan pangan regional melalui pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan program desa mandiri pangan memiliki efek terhadap ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran program unggulan pemerintah daerah, yakni Program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP). Program ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 38 Tahun 2022, merupakan bantuan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang untuk pemberdayaan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. SJSP bertujuan meningkatkan ekonomi keluarga, menyediakan sumber pangan, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian masyarakat. Program ini melibatkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP)

dalam penyaluran bibit, pupuk, sarana produksi, serta pendampingan teknis mulai dari penanaman hingga pasca panen.

Kecamatan Luwuk Selatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Banggai, juga menjadi sasaran program SJSP. Namun, meskipun letaknya strategis dan memiliki luas wilayah yang cukup besar, penerimaan pendapatan kelompok dari program SJSP di Kecamatan Luwuk Selatan masih tergolong rendah dibandingkan kecamatan lain yang secara geografis lebih kecil atau lebih jauh dari pusat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan bantuan program SJSP di Kecamatan Luwuk Selatan belum optimal, sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal bagi peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat setempat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang mendorong dilakukannya penelitian ini adalah Pertama, meskipun program SJSP telah terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai secara umum, implementasi program ini di Kecamatan Luwuk Selatan belum menunjukkan hasil yang optimal. Kedua, penerimaan pendapatan kelompok di Kecamatan Luwuk Selatan masih jauh di bawah kecamatan lain yang memiliki potensi serupa, bahkan yang berbatasan langsung dengan wilayah ini.

Ketiga, meskipun pemerintah daerah telah memberikan bantuan dalam bentuk bibit, pupuk, alat pertanian, dan pendampingan teknis, tingkat partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan pemanfaatan lahan pekarangan di Kecamatan Luwuk Selatan masih perlu ditingkatkan. Keempat, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan program SJSP di Kecamatan Luwuk Selatan.

Berdasarkan masalah tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Satu Juta Satu Pekarangan di Kecamatan Luwuk Selatan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun pemanfaatan lahan. Penelitian oleh Pamungkas, dkk. (2024) dengan judul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Peserta Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu” menemukan bahwa tingkat kesejahteraan petani peserta program Pekarangan Pangan Lestari di Kabupaten OKU termasuk dalam kategori tinggi. Indikator perumahan dan lingkungan merupakan penyumbang terbesar dari indikator kesejahteraan dimana terdapat skor 2,86 (14,45%) diikuti dengan indikator kemiskinan dimana terdapat skor 2,70 (13,65%). Sedangkan untuk indikator yang masih menyumbang kontribusi rendah pada tingkat kesejahteraan yaitu indikator taraf dan pola konsumsi dimana terdapat skor 2,09 (10,58%). Penelitian oleh Sari, dkk. (2022) dengan judul “Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Sari Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah (Studi Di Kelurahan Pulokerto Kota Palembang)” menemukan bahwa proses pemberdayaan yang diterima KWT Mekar Sari yakni pendekatan awal, sosialisasi, pembuatan proposal kegiatan, memperkuat pengetahuan dan keterampilan, serta evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan KWT Mekar Sari mendapat hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yakni rendahnya partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, rendahnya antusiasme menanam di

pekarangan masing-masing, kurang motivasi, dan kurang mendapat manfaat dari kegiatan ini. Sedangkan hambatan eksternal yakni adanya masalah pada kebun bibit, kurang komunikasi antara PPL dengan KWT, mendapat gangguan dari hewan ternak, dan yang terakhir disebabkan oleh pandemi Covid-19. Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yakni : pertama kesetaraan, Kedua adalah partisipasi, Ketiga kemandirian dan yang keempat Berkelanjutan. Penelitian oleh Saputri, dkk. (2021) dengan judul “Dampak Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar” menemukan bahwa program P2L di Kecamatan Gondangrejo membawa dampak ekonomi melalui penghematan pengeluaran belanja sayur. Dampak sosial dapat dirasakan dengan adanya perubahan perilaku dan terbentuknya dinamika kelompok, secara psikologis terlihat adanya sikap wanita tani yang mau belajar budidaya sayur. Dampak program P2L apabila ditinjau dari aspek budaya belum terlihat. Program P2L tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Pengabdian masyarakat oleh Wulandari dan Sulistyowati (2024) dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Penanaman Tanaman Obat Keluarga” pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal pengolahan dan pemanfaatan tanaman TOGA; 2) dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman TOGA. Penelitian oleh Pinastri, dkk. (2024) dengan judul “Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Program P2L di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar” menemukan bahwa tingkat partisipasi anggota kelompok wanita tani secara keseluruhan berada pada kategori tinggi, faktor-faktor yang berhubungan secara signifikan dengan partisipasi anggota KWT, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan tingkat dukungan suami/keluarga. Pengabdian masyarakat oleh Sumarno, dkk. (2024) dengan judul “Pendampingan Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dalam Program Teras Hejo di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor, Jawa Barat” hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan ibu rumah tangga dalam mengelola pekarangan untuk menghasilkan komoditas pangan yang bernilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga. Program Teras Hejo berhasil meningkatkan akses ibu rumah tangga terhadap pangan sehat dan bergizi, serta memberikan dampak positif terhadap pendapatan rumah tangga melalui penjualan hasil budidaya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana letak perbedaannya yaitu pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Pamungkas N, dkk. (2024), Sari, dkk. (2022), Saputri, dkk. (2021), Wulandari dan Sulistyowati (2024), serta Pinastri, dkk. (2024), umumnya membahas program pemanfaatan pekarangan dalam konteks yang berbeda-beda, baik dari segi program yang dikaji, lokus penelitian, sasaran, maupun metode penelitian yang digunakan.

Penelitian terdahulu banyak yang berfokus pada program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), atau optimalisasi lahan pekarangan untuk tanaman obat keluarga. Sementara itu, penelitian yang dilakukan berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Satu Juta Satu Pekarangan di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah” mengambil

fokus pada program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut.

Dari segi lokus penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kelurahan Pulokerto Kota Palembang, Kecamatan Gondangrejo dan Karangpandan Kabupaten Karanganyar, serta Desa Jombatan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Sementara itu, lokus penelitian ini berada di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga memberikan sudut pandang baru terkait implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis pekarangan di wilayah tersebut.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, melalui program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dipilih karena sesuai dengan karakteristik fenomena pemberdayaan masyarakat melalui program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Metode kualitatif dipilih berdasarkan filsafat *postpositivisme*, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan pengumpulan data dilakukan secara triangulasi untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, autentik, dan faktual mengenai proses pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan program SJSP di lapangan (Sugiyono, 2022).

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder sesuai klasifikasi Simangunsong (2017), dengan data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan informan kunci meliputi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Banggai, Camat Luwuk Selatan, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, serta ketua kelompok penerima manfaat, yang dipilih karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program SJSP sehingga mampu memberikan informasi yang representatif dan mendalam.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Luwuk Selatan dan Kantor Dinas TPHP Kabupaten Banggai selama empat minggu pada Januari 2025, dengan durasi yang memadai untuk mengumpulkan data secara komprehensif. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat melalui program SJSP secara menyeluruh (Sugiyono, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi lahan pekarangan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kestabilan ekonominya

secara mandiri. Program ini dilakukan dengan pemberian bantuan berupa bibit dan beberapa perlengkapan tanaman lainnya oleh pemerintah daerah melalui Dinas TPHP kepada masyarakat penerima manfaat kemudian pemerintah juga melakukan pendampingan mulai dari penyaluran bantuan hingga pasca panen agar program ini tetap terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program SJSP di Kecamatan Luwuk Selatan dapat dianalisis berdasarkan empat prinsip pemberdayaan masyarakat menurut teori Najiyyati, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip keswadayaan, dan prinsip berkelanjutan. Analisis ini dilakukan melalui penelitian lapangan yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai, Kepala Bidang Hortikultura, Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura, Camat Luwuk Selatan, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Luwuk Selatan, dan kelompok penerima manfaat program SJSP.

3.1 Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan atau kesejajaran kedudukan merupakan sebuah prinsip utama dalam proses pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada pentingnya lingkungan yang adil dan setara bagi masyarakat dalam upaya pemberdayaan tanpa melihat golongan atau status dari masyarakat tersebut. Dalam konteks program SJSP di Kecamatan Luwuk Selatan, prinsip kesetaraan diwujudkan melalui dua indikator utama yaitu pemenuhan hak dan kewajiban serta pemberian bantuan secara adil dan merata.

Hak dan Kewajiban

Pelaksanaan program SJSP pada Dinas TPHP telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masyarakat penerima manfaat untuk memastikan keduanya tetap terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Banggai, Subhan Lanusi, dijelaskan bahwa dalam bidang pertanian yang dibantu merupakan petani yang mau bekerja tanpa melihat status sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa program SJSP tidak membedakan status sosial masyarakat dalam pemberian bantuan.

Mekanisme pemberian bantuan yang telah ditetapkan oleh Dinas TPHP berisi berbagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban secara spesifik. Kepala Bidang Hortikultura, Choirul Ashari Mambuhu, menjelaskan bahwa hak masyarakat penerima manfaat adalah menerima bantuan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, dan hal tersebut sudah terpenuhi. Sementara itu, kewajiban petani meliputi pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pemanfaatan bantuan dengan tepat sasaran, contohnya menanam dan merawat benih yang diberikan dengan baik dan maksimal.

Keadilan

Pemberian bantuan program SJSP dilakukan secara merata kepada setiap kelompok khususnya di Kecamatan Luwuk Selatan. Fitriani selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Luwuk Selatan menegaskan bahwa bantuan yang diberikan telah adil dan merata karena pada dasarnya setiap kelompok diberikan bantuan yang sama. Sebagai contoh, dalam pemberian bantuan alat seperti *handsprayer*, apabila pada satu kelompok diberikan dua buah *handsprayer* maka kelompok yang lain juga diberikan dua

handsprayer dengan jumlah yang sama. Begitu juga dengan pemberian benih yang sama dan merata pada semua kelompok di Kabupaten Banggai.

Selain pemberian bantuan fisik, masyarakat penerima manfaat program SJSP juga tetap diberikan pendampingan dan pemahaman melalui komunikasi yang intensif. Abadi selaku ketua kelompok Nyiur Melambai menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan Dinas TPHP adalah komunikasi yang tidak pernah putus sehingga kendala yang dihadapi di lapangan dapat diselesaikan dengan solusi yang tepat. Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung tanpa melihat bagaimana sulitnya akses ke tempat penanaman.

Komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip kesetaraan juga tercermin dalam pemberian bantuan berupa informasi melalui komunikasi dengan melakukan *monitoring* kepada petani ketika terdapat kendala seperti gejala pada tanaman. Hal ini dilakukan oleh pihak BPP Kecamatan untuk memberikan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program SJSP di Kecamatan Luwuk Selatan.

3.2 Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi merupakan prinsip yang dibutuhkan dalam rangka menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan yang dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program yang sedang terlaksana. Prinsip partisipasi memiliki empat indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Perencanaan Program

Dalam tahap perencanaan, pemerintah daerah melalui Dinas TPHP merencanakan program SJSP sesuai dengan target-target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas TPHP, Subhan Lanusi, menjelaskan bahwa untuk dapat menyukseskan program ini, para petani harus didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan dengan pembinaan yang merata dan pengawalan dari dinas agar target-target yang diinginkan tercapai.

Camat Luwuk Selatan, Rifody Penak, menegaskan bahwa semua masyarakat dilibatkan pada saat rapat mengenai perencanaan di tingkat dusun atau kelurahan. Melalui musyawarah ini, masyarakat dapat menyampaikan keinginan mereka terhadap program dan pemerintah berperan memfasilitasi hal tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga dirasakan oleh Burhanudin selaku ketua kelompok KWT Madani yang menyampaikan bahwa Dinas TPHP dan BPP dari awal melakukan penyuluhan dengan mengundang masyarakat yang tergabung dalam kelompok penerima manfaat untuk diberitahukan cara bertani yang baik dan hal-hal yang harus dihindari.

Pelaksanaan Program

Dalam tahap pelaksanaan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam program SJSP di Kecamatan Luwuk Selatan. Fitriani selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian menyampaikan bahwa kendala yang terjadi pada tahun 2023 adalah cuaca dan musim kemarau yang terjadi selama beberapa bulan serta bantuan yang disalurkan turun bertepatan pada musim kemarau. Ditambah lagi wilayah Kecamatan Luwuk Selatan berbeda dengan wilayah persawahan yakni tidak adanya pengairan sehingga sangat mengharapkan musim hujan.

Kepala Bidang Hortikultura menjelaskan bahwa kendala umum terjadi akibat cuaca sehingga cara mengantisipasinya melalui penyaluran bantuan yang disesuaikan dengan pola musim. Namun, kendala selanjutnya adalah penetapan DPA yang biasanya ditetapkan pada bulan Desember dan idealnya bulan Januari sudah terlaksana, tetapi pada pelaksanaannya bisa juga tertunda. Hal ini menyebabkan proses penyaluran bantuan terlambat sehingga pada saat memasuki musim tanam, bantuan yang dibutuhkan belum tersedia untuk disalurkan.

Pengawasan Program

Dinas TPHP Kabupaten Banggai melakukan kontrol dan pengawasan menggunakan aplikasi WhatsApp grup untuk pembinaan program SJSP. Laporan dari kelompok dan penyuluh di lapangan juga termonitor di grup tersebut sehingga kendala-kendala yang terjadi di lapangan bisa diatasi seminimal mungkin. Selain itu, Dinas TPHP juga telah mengalokasikan sekitar 3 juta rupiah untuk setiap Balai Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan pengawasan dengan melakukan pelaporan untuk memastikan perkembangan tanaman. Anggaran ini juga sebagai bentuk dukungan operasional kepada penyuluh dalam melaksanakan *monitoring* di lapangan.

Evaluasi Program

Program SJSP yang dilaksanakan secara umum telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana Dinas TPHP Kabupaten Banggai. Kepala Bidang Hortikultura menyampaikan bahwa secara umum program berjalan dan terlaksana dengan baik karena peran dari berbagai pihak seperti penyuluh di lapangan, walaupun terdapat beberapa catatan yang harus dikoreksi terutama pada kendala keterlambatan penyaluran bantuan.

3.3 Prinsip Keswadayaan

Prinsip keswadayaan atau kemandirian merupakan prinsip yang menghargai dan memprioritaskan kemampuan masyarakat dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh pihak lain. Konsep dari prinsip ini adalah memandang orang miskin sebagai subjek yang mempunyai kemampuan serba terbatas bukan sebagai objek yang sama sekali tidak memiliki kemampuan. Prinsip keswadayaan terdiri dari dua indikator yaitu kemampuan pengambilan keputusan dan kemampuan produktivitas.

Kemampuan Pengambilan Keputusan

Dalam meningkatkan keswadayaan masyarakat penerima manfaat program SJSP, Dinas TPHP melakukan sosialisasi seperti bimbingan teknis secara berkala kepada masyarakat yang dipandu oleh penyuluh pertanian lapangan sehingga target-target dari program SJSP bisa tercapai. Sosialisasi melalui bimbingan teknis yang diberikan sebelum program SJSP berjalan dimaksudkan agar masyarakat penerima manfaat dapat melaksanakan program tersebut dengan mandiri dan tetap dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Camat Luwuk Selatan, Rifody Penak, menegaskan bahwa pemerintah tidak membiarkan begitu saja dan terus memantau para masyarakat penerima manfaat. Pemerintah juga terus melibatkan mereka sehingga tumbuh rasa tanggung jawab dan rasa untuk terus mengembangkan setiap bantuan yang diberikan secara mandiri. Pada dasarnya, keputusan yang mereka tentukan adalah untuk mereka juga sehingga

pemerintah terus memantau hal-hal yang mereka sepakati agar tujuan dari program ini bisa tercapai.

Kemampuan Produktivitas

Untuk meningkatkan produktivitas, Dinas TPHP tidak hanya memberikan bantuan namun juga melakukan kontrol terhadap bantuan yang diberikan. Ketika memberikan bantuan seperti pupuk dan berbagai sarana produksi pertanian atau saprodi, dinas juga memberikan pembinaan agar produksi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus hasil produksi yang berlebih dapat dijual kembali.

Fitriani selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Luwuk Selatan mengungkapkan bahwa program SJSP sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan yang dimilikinya. Sebelumnya masyarakat hanya menanam beberapa tanaman menjadi lebih banyak dari sebelumnya, sehingga untuk produksi yang sebelumnya hanya sedikit menjadi lebih banyak dan ada peningkatan pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena penyuluh memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menanam dengan skala yang besar karena telah mendapatkan bantuan yang diberikan melalui program SJSP.

Masyarakat juga merasa sangat terbantu dengan adanya program SJSP karena dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi dengan menjual kembali hasil produksi yang berlebih. Abadi selaku ketua kelompok Nyiur Melambai menjelaskan bahwa program ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dengan memberikan pengetahuan dan berbagai bantuan seperti tanaman cabe yang dapat menjadi pemasukan dan di samping itu masyarakat jadi lebih sering menjual daripada membeli tanaman-tanaman tersebut ketika ke pasar.

Peningkatan produktivitas juga didukung oleh data dari Kecamatan Luwuk Selatan Dalam Angka tahun 2024 mengenai hasil produksi tanaman semusim dimana terdapat adanya peningkatan pada produksi tanaman semusim seperti cabe, bawang merah, dan tomat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat produksi bawang merah sebanyak 2 kuintal, cabai sebanyak 22 kuintal, dan tomat sebanyak 1 kuintal, sementara pada tahun 2021 dan 2022 belum ada produksi untuk ketiga jenis tanaman tersebut.

3.4 Prinsip Keberlanjutan

Prinsip berkelanjutan merupakan prinsip yang menekankan pada keberlangsungan program dan pengelolaan sumber daya yang baik. Pada awalnya program yang dirancang untuk berkelanjutan memiliki tahap dimana pendamping memiliki peran yang paling dominan dibanding masyarakat, tetapi peran tersebut akan perlahan berkurang dan terhapus oleh masyarakat yang telah mandiri dan telah mampu mengelola sumber daya yang diberikan melalui program pemberdayaan secara bertahap dan konsisten. Prinsip berkelanjutan memiliki dua indikator yaitu keberlangsungan program dan pengelolaan sumber daya.

Keberlangsungan Program

Untuk menjaga keberlangsungan program SJSP, Kepala Bidang Hortikultura menyampaikan bahwa perlu dilakukan pemberian motivasi secara masal dalam bentuk

kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat seperti pemberian *reward* agar dapat memberikan contoh yang baik kepada kelompok yang lain.

Fitriani selaku Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Luwuk Selatan menjelaskan bahwa salah satu aspek yang mendukung keberlanjutan dari program SJSP adalah terdapat kunjungan atau *monitoring* kepada para masyarakat penerima manfaat. Melalui kunjungan tersebut, penyuluh dapat dengan mudah memberikan informasi mengenai harga-harga dan memberikan prediksi mengenai kenaikan harga bahan pokok yang terdapat di pasar. Selain itu, penyuluh juga mudah dalam mengarahkan masyarakat untuk menanam tanaman tertentu seperti cabai yang akan naik pada bulan tertentu sehingga mereka dapat memanen tanaman yang sebelumnya sudah ditanam pada saat harga tanaman tersebut mengalami kenaikan. Dengan demikian, keuntungan pendapatan dari hasil panen dapat dijual lagi untuk dipergunakan kembali sebagai modal awal membeli benih atau alat penunjang yang lain.

Pengelolaan Sumber Daya

Dalam pengelolaan sumber daya program SJSP, Dinas TPHP mengadakan pelatihan dan sosialisasi guna menyampaikan kepada masyarakat mengenai target yang ingin dicapai dari program ini, hal-hal baru yang belum mereka dapatkan sebelumnya, dan cara memanfaatkan bantuan yang diberikan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nunung Rahmawati Kamaru selaku Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura menambahkan bahwa dinas juga mengadakan pertemuan yang dijadwalkan sekitar dua minggu atau satu bulan sekali yang rutin dilaksanakan agar dapat memberikan masukan mengenai inovasi dan hal-hal yang baru mengenai pengelolaan bantuan yang diberikan.

BPP Kecamatan Luwuk Selatan juga memberikan pengarahan terkait pemanfaatan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan dengan melakukan penanaman kembali yang diperoleh dari hasil produksi sebelumnya. Fitriani menjelaskan bahwa cara menjaga sumber daya yang diberikan adalah dengan mengarahkan untuk melakukan penanaman ulang secara berkelanjutan. Hasil yang didapatkan dapat dijadikan modal untuk membeli benih dan untuk bantuan alat penunjang lain seperti *handsprayer* dan keranjang buah dapat digunakan kembali karena alat-alat tersebut dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat dipergunakan kembali secara berkelanjutan.

Keberlanjutan program SJSP di Kecamatan Luwuk Selatan tidak terlepas dari peran BPP Kecamatan Luwuk Selatan yang berupaya mengarahkan untuk menjaga sumber daya atau bantuan yang diberikan secara berkelanjutan dengan melakukan penanaman kembali. Untuk melakukan penanaman kembali dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil pendapatan yang diperoleh dari produksi sebelumnya untuk membeli benih tanaman. Adapun sarana dan prasarana penunjang yang lain seperti *handsprayer* atau keranjang buah dapat dipergunakan secara berulang sehingga dapat menghemat biaya penanaman ulang oleh masyarakat di Kecamatan Luwuk Selatan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Kecamatan Luwuk Selatan secara umum berjalan sesuai prinsip pemberdayaan masyarakat, yakni kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan keberlanjutan. Sama halnya dengan temuan penelitian Pamungkas dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa program pekarangan pangan mampu meningkatkan kesejahteraan

petani, khususnya melalui distribusi bantuan yang adil dan peningkatan produktivitas tanaman pekarangan. Prinsip kesetaraan yang diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban serta keadilan dalam distribusi bantuan dalam penelitian ini memperkuat temuan tersebut, dimana pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan secara merata tanpa membedakan status sosial penerima manfaat.

Namun, berbeda dengan penelitian Sari dkk. (2022) yang menemukan hambatan internal berupa rendahnya partisipasi dan motivasi masyarakat, penelitian ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program SJSP, didukung oleh komunikasi intensif antara penyuluh dan kelompok penerima manfaat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Prastyanti (2024) yang menekankan pentingnya strategi komunikasi partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat melalui urban farming untuk keberhasilan dan keberlanjutan program. Kendala cuaca dan keterlambatan penyaluran bantuan yang ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan kendala yang dihadapi dalam berbagai program pemberdayaan lahan pekarangan sebelumnya (Saputri dkk., 2021), yang mengindikasikan perlunya penyesuaian waktu dan pola penyaluran bantuan agar lebih efektif.

Temuan mengenai prinsip keswadayaan yang menekankan kemandirian masyarakat dalam pengambilan keputusan dan peningkatan produktivitas juga sejalan dengan hasil penelitian Wulandari dan Sulistyowati (2024) serta Sumarno dkk. (2024) yang menyatakan bahwa pemberdayaan ibu rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan mampu meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa program SJSP tidak hanya memberikan bantuan fisik tetapi juga pembinaan yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan produksi tanaman semusim seperti cabai dan bawang merah yang signifikan mendukung temuan Wijaya (2021) yang menyatakan bahwa program cadangan pangan berkelanjutan mampu memperbaiki pola konsumsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan.

Prinsip keberlanjutan yang diterapkan melalui monitoring, pemberian motivasi, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dalam penelitian ini juga menguatkan temuan Dulkadir (2024) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan berbasis pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada kontinuitas kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan studi Porter (2018) yang menekankan bahwa kegiatan pekarangan dan urban farming memberikan dampak positif tidak hanya pada aspek ekonomi dan pangan, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya yang mendukung perubahan sosial yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat berbagai studi terdahulu yang menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan dapat meningkatkan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan kemandirian masyarakat. Namun, penelitian ini juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kendala lingkungan dan administrasi yang dapat menghambat efektivitas program, sehingga perlu adanya penyesuaian strategi pelaksanaan agar hasil yang dicapai lebih optimal dan berkelanjutan.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Satu Juta Satu Pekarangan di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yaitu musim kemarau yang menyebabkan masyarakat penerima manfaat program SJSP di Kecamatan Luwuk Selatan kesulitan untuk mendapatkan pengairan dan memberikan pengaruh terhadap kualitas tanah sebagai media tanaman. Serta keterlambatan penyaluran bantuan program SJSP, sehingga membuat penyaluran bantuan tidak tepat pada saat musim tanam dan bergeser hingga memasuki musim kemarau.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Kecamatan Luwuk Selatan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, dan keberlanjutan. Program ini berhasil memberikan bantuan secara adil dan merata, melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan hingga evaluasi, serta mendorong kemandirian dan peningkatan produktivitas masyarakat melalui pendampingan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Meskipun terdapat kendala seperti cuaca dan keterlambatan penyaluran bantuan, pemerintah daerah telah berupaya mengantisipasi dan mengelola program agar tetap berjalan optimal.

Dengan demikian, program SJSP berkontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di Kecamatan Luwuk Selatan, meskipun masih perlu perbaikan dalam aspek teknis pelaksanaan. Temuan ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pemberdayaan berbasis pekarangan sebagai strategi efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni pada waktu dan biaya yang membatasi ruang lingkup pengumpulan data serta kedalaman analisis yang dapat dilakukan. Penelitian hanya difokuskan pada pelaksanaan program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Kecamatan Luwuk Selatan, sehingga hasilnya belum dapat mewakili kondisi di kecamatan lain atau wilayah yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya melibatkan sebagian informan kunci dan kelompok penerima manfaat tertentu, sehingga variasi pengalaman dan pandangan masyarakat secara keseluruhan belum sepenuhnya tergambarkan secara komprehensif. Keterbatasan ini perlu menjadi pertimbangan dalam interpretasi hasil dan rekomendasi yang diberikan.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini merupakan langkah awal dalam memahami pelaksanaan program Satu Juta Satu Pekarangan (SJSP) di Kecamatan Luwuk Selatan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dengan mengkaji dampak jangka panjang program pemberdayaan terhadap perubahan kualitas hidup, kemandirian ekonomi, dan ketahanan pangan masyarakat di berbagai kecamatan atau wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penting untuk melakukan penelitian dengan metode yang lebih beragam, seperti pendekatan kuantitatif

atau *mixed methods*, serta melibatkan lebih banyak partisipan dari berbagai kelompok masyarakat agar hasilnya lebih representatif dan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas dan keberlanjutan program SJSP.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Drs. Jojo Juhaeni, MM selaku pembimbing dalam penelitian ini, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Antara, G. E. D. (2015). Peningkatan Inovasi Teknologi Tepat Guna Dan Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Memajukan Industri Kreatif Di Bali. *Penelitian Dan Aplikasi Sistem Dan Teknik Industri*, 9(3), 182925.
- Anwas, O. M. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung: CV ALFABETA.
- Dulkadir (2024). Realizing regional food security by empowering the communities through the food independent village program. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10), ISSN 2572-7923, <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7714>
- Eprilianto, D.F. (2023). Village Community Empowerment through Sustainable Food Program in Realizing Sustainable Agriculture. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1275(1), ISSN 1755-1307, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1275/1/012022>
- Hamid, Hendrawati. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar : De La Macca.
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. 2005. Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Bogor: *Wetlands International – Indonesia Programme*.
- Pamungkas, N., Oktarina, Y., & Permatasari, F. (2024). Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Peserta Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(1), 1132–1143. <https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4272>
- Pinastri, L. M., Anantanyu, S., & Widiyanto, W. (2024). Tingkat Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani dalam Program P2L di Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Kirana*, 5(2), 107-118. <https://doi.org/10.19184/jkkn.v5i2.47268>
- Prastyanti, S. (2024). Participatory Development Communication Strategy of an Urban Farming Program in Yogyakarta, Indonesia. *Palabra Clave*, 27(4), ISSN 0122-8285, <https://doi.org/10.5294/pacla.2024.27.4.11>
- Saputri, E. M., Wibowo, A., & Rusdiyana, E. (2021). Dampak Implementasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. *Agrica Ekstensa*, 15(2), 125-131. <https://doi.org/10.55127/ae.v15i2.99>

- Sari, N. P., Hendarso, Y., & Taqwa, R. (2022). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (Kwt) Mekar Sari dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah (Studi di Kelurahan Pulokerto Kota Palembang). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 8(1), 135–146. <https://doi.org/10.33369/jsn.8.1.135-146>
- Saroinsong, F.B. (2021). Utilization of Home Gardens as a Community Empowerment-Based Edible Landscape to Combat Stunting. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 940(1), ISSN 1755-1307, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012093>
- Simangunsong, F. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: CV ALFABETA.
- Sugiyanto (2023). Community Empowerment as an Effort for Handling Food Consumption Patterns in Malang Raya. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1153(1), ISSN 1755-1307, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1153/1/012033>
- Sugiyono. 2022. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: ALFABETA.
- Sumarno, D. A., dkk. (2024). Pendampingan Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dalam Program Teras Hejo di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 133-151.
- Surya, B. (2020). Management of slum-based urban farming and economic empowerment of the community of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18), ISSN 2071-1050, <https://doi.org/10.3390/SU12187324>
- Wijaya, A.F. (2021). Malnutrition mitigation and community empowerment through the sustainable food reserve programme in Indonesia. *Development in Practice*, 31(1), 37-48, ISSN 0961-4524, <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1782845>
- Wulandari, S. Y., & Sulistyowati, S. N. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Penanaman Tanaman Obat Keluarga. *Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 92-98. <https://doi.org/10.32764/abdimasper.v5i2.4736>